

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FRAUD* PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Retno Wulandari*

PT. Purinusa Eka Persada

Dhini Suryandari

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali persepsi pegawai di instansi pemerintahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum dan moralitas individu. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Temanggung sebanyak 95 responden. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dengan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif sistem pengendalian internal terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh keadilan prosedural terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud*, terdapat pengaruh negatif moralitas individu terhadap *fraud*.

Kata Kunci: *Fraud*; Persepsi; Sektor Pemerintahan

Abstract

The purpose of this study was to explore the perceptions of employees in government agencies about the factors that influence fraud. These factors include the internal control system, the asymmetry of information, distributive justice, procedural justice, organizational culture, law enforcement and individual morality. The population in this study is were employees of SKPD in Temanggung Regencyas many as 95 respondents. Methods of data collection is done by using questionnaires with Likert scale 1-5. This study uses multiple regression data analysis tools. The results showed that there was a negative effect of the internal control system against fraud, there is a positive effect of information asymmetry against fraud, there is no influence of distributive justice against fraud, there is no influence procedural justice against fraud, there is no influence of organizational culture against fraud, there is no influence of law enforcement against fraud, there is a negative influence individual morality against fraud.

Keywords: Fraud; Perception; Government Sector.

PENDAHULUAN

Selama ini *fraud* (kecurangan) telah menarik perhatian media dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Pada umumnya, kecurangan erat kaitannya dengan korupsi. Kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di tingkat daerah, sebagai contoh di Kabupaten Temanggung yaitu kasus korupsi senilai Rp 15 miliar yang melibatkan mantan Bupati Temanggung, Totok Ary Wibowo. Kasus ini terjadi pada tahun 2005 saat beliau menjabat sebagai Bupati Temanggung. Kasus tersebut antara lain dana bantuan pendidikan untuk keluarga anggota DPRD Temanggung, dana pemilu, dana

pengembangan crisis centre, dana belanja tak terduga, dan dana pengadaan motor. (Sumber: www.suaramerdeka.com, tanggal 8 Maret 2005). Berita lain menyebutkan bahwa dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Temanggung telah menghukum mantan Wakil Ketua DPRD Temanggung periode 2004-2009, Fatahillah Azzainy dengan pidana satu tahun dan empat bulan penjara. Sedangkan enam mantan anggota DPRD Temanggung periode yang sama, dijatuhi hukuman satu tahun hingga satu tahun dan dua bulan penjara. (Sumber: www.suaramerdeka.com, tanggal 23 Juli 2014). Selain itu, berita yang diperoleh dari www.radarsemarang.com, 18 Juni 2014 menyebutkan bahwa ada juga kasus yang diketahui macet, seperti kasus proyek pembangunan Pasar Kliwon Temanggung tahun 2002-2003 senilai Rp 2,5 miliar, dimana kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jateng.

Alasan peneliti tertarik memilih topik penelitian ini adalah karena bagi peneliti masalah korupsi merupakan masalah yang tidak pernah basi dan sangat signifikan dalam pemerintah daerah saat ini. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai SKPD Kabupaten Temanggung, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud. Alasan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung dikarenakan adanya beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum, dan moralitas individu.

Berdasarkan Teori Fraud Triangle Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2010), kecurangan disebabkan karena adanya 3 faktor, yaitu rasionalisasi (Rationalization), peluang (Opportunity), dan tekanan (Pressure). Dari ketiga faktor dalam teori inilah penentuan terhadap variabel-variabel di dalam penelitian ini akan digunakan. Variabel-variabel yang dijadikan dalam penelitian ini merupakan proksi dari unsur Fraud Triangle yakni rasionalisasi (Rationalization), peluang (Opportunity), dan tekanan (Pressure). Rasionalisasi atau Rationalization menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu rasionalisasi dengan kultur organisasi dan moralitas individu. Kesempatan atau Opportunity adalah peluang yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kecurangan. Dalam penelitian ini, peneliti memproksikan terjadinya kesempatan dalam fraud dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang efektif, asimetri informasi dan penegakan hukum. Tekanan atau Pressure adalah dorongan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak kecurangan, karena kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Dalam penelitian ini peneliti memproksikan suatu tekanan dengan keadilan distributif dan keadilan prosedural.

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud). Wilopo (2006) menunjukkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap KKA dan perilaku tidak etis, dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap KKA dan perilaku tidak etis, sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap KKA dan perilaku tidak etis, selain itu perilaku tidak etis berpengaruh secara positif terhadap KKA. Kusumastuti (2012) menunjukkan keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pristiyanti (2012) menunjukkan tidak terdapat pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap fraud, terdapat pengaruh

negatif sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi terhadap fraud. Zulkarnain (2013) menunjukkan keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dengan fraud, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis dengan fraud, sedangkan kultur organisasi dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap fraud. Najahningrum (2013) menunjukkan penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud, terdapat pengaruh positif asimetri informasi dengan fraud, sedangkan budaya etis organisasi tidak terdapat pengaruh terhadap fraud. Prawira dkk. (2014) menunjukkan moralitas individu dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud, dan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap fraud. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Oleh sebab itu, untuk mengurangi penyebab terjadinya perilaku kecurangan seseorang, maka diperlukan adanya sistem pengendalian internal. Biasanya, kecurangan dilakukan seseorang terjadi karena adanya kesempatan yang ditimbulkan akibat lemahnya pengendalian internal. Oleh karena itu, mengefektifkan pengendalian internal dalam suatu organisasi sangatlah penting untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Kusumastuti menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil tersebut berbeda dengan Wilopo (2006), Pristiyanti (2012), Faisal (2013), Zulkarnain (2013), Najahningrum (2013) dan Prawira, dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin efektif sistem pengendalian dalam suatu organisasi, akan meminimalisir adanya tindak kecurangan (*fraud*) oleh karyawan.

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud.

Penelitian yang dilakukan Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi, dalam teori keagenan yang sering digunakan dalam menjelaskan permasalahan antara agent dengan principal asimetri informasi memungkinkan untuk saling memanfaatkan bagi keuntungan pribadi. Asimetri informasi dipicu karena adanya kondisi dimana manajer sebagai pengelola perusahaan atau penyedia informasi (*agent*) lebih banyak memahami kondisi internal perusahaan daripada pengguna informasi (*principal*).

Wilopo (2006) dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan Najahningrum (2013) dan Prawira, dkk. (2014) yang menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap fraud. Jadi, semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi antara pihak *agent* dan *principal*, akan meningkatkan tindak kecurangan (*fraud*).

H2: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap fraud.

Menurut Robins (1996) dalam Lubis (2010) pada teori persepsi, persepsi suatu individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lain terhadap objek yang sama. Di dalam suatu organisasi perbedaan persepsi juga dapat terjadi pada masalah keadilan distributif. Menurut Greenberg dan Baron (2003) dalam Hasmarini dan Yuniawan (2008) menjelaskan keadilan distributif adalah persepsi seseorang mengenai keadilan atas pendistribusian sumber-sumber diantara

para karyawan. Atau dengan kata lain yaitu persepsi keadilan atas bagaimana imbalan didistribusikan diantara para karyawan. Selanjutnya, Supardi (2008) menegaskan bahwa keadilan distributif dapat tercapai bila penerimaan dan masukan antara dua orang sebanding. Jikalau tidak sebanding, maka karyawan akan mempersepsikan tidak adanya keadilan dimana hal ini akan menimbulkan dorongan dalam diri karyawan tersebut untuk melakukan tindak kecurangan.

Pristiyanti (2012) dalam penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara keadilan distributif terhadap fraud. Hasil tersebut berbeda dengan Najahningrum (2013) yang menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Artinya, semakin tinggi keadilan distributif pada suatu organisasi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi tersebut.

H3: Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap fraud.

Keadilan prosedural mengacu pada persepsi mengenai prosedur-prosedur dalam pemberian hasil (misalnya gaji atau kompensasi) yang dilakukan oleh organisasi kepada karyawan, adil atau tidak. Menurut Robins (1996) dalam Lubis (2010) pada teori persepsi, persepsi suatu individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lain terhadap objek yang sama. Karyawan mempersepsikan adanya keadilan berdasarkan keputusan pengambil kebijakan.

Penelitian yang dilakukan Pristiyanti (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural terhadap fraud. Sedangkan, Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Dengan kata lain, semakin tinggi keadilan prosedural dalam suatu organisasi, akan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam organisasi tersebut.

H4: Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap fraud.

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) dan kekuatan eksternal (external forces). Oleh sebab itu dalam sebuah organisasi perlu adanya kultur organisasi. Kultur organisasi adalah suatu sistem yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya, dimana sistem tersebut harus dipatuhi oleh anggota-anggotanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013), Zulkarnain (2013) dan Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi terhadap fraud. Sedangkan, Sulistyowati (2007) mengindikasikan bahwa kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap tindak korupsi. Dengan kata lain, jika dalam suatu organisasi memiliki kultur organisasi yang baik, maka kecenderungan kecurangan (fraud) yang terjadi semakin rendah.

H5: Kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap fraud.

Hukum diciptakan untuk mengatur pola perilaku atau tingkah laku manusia. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Sebagian masyarakat mengerti tentang hukum, namun masih saja ada yang melanggarnya. Dalam teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces) dan kekuatan eksternal (external forces). Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum, dengan tujuan untuk mencegah adanya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya tindak kecurangan. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan.

Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap fraud. Hasil tersebut berbeda dengan Faisal (2013) dan Najahningrum (2013) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Artinya, semakin tinggi penegakan hukum, maka kecenderungan kecurangan (fraud) yang terjadi semakin rendah.

H6: Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap fraud.

Teori perkembangan moral yang dikembangkan Kohlberg berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis. Menurut Liyanarachchi (2009) dalam Puspasari (2012) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Dalam tindakannya, orang yang memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Prawira dkk. (2014) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, semakin cenderung tidak melakukan tindak kecurangan.

H7: Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap fraud.

METODE PENELITIAN

Populasi target dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada bagian keuangan di SKPD Kabupaten Temanggung. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner yang disebar ke seluruh dinas daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten Temanggung. Adapun hasil pengumpulan kuesioner yang kembali adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

| No. | Keterangan | Jumlah | Presentase |
|-----|---|--------|------------|
| 1. | Kuesioner yang disebar | 110 | 100% |
| 2. | Kuesioner yang tidak kembali | 7 | 6,36% |
| 3. | Kuesioner yang kembali | 103 | 93,64% |
| 4. | Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya | 8 | 7,27% |
| 5. | Kuesioner yang dapat diolah | 95 | 86,36% |

Sumber: Data diolah, 2015

Berikut ini merupakan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Definisi | Pengukuran |
|----------|--|--|
| Fraud | Suatu tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan kerugian korbannya. | Dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan menurut ACFE dalam Najahningrum (2013), yang terdiri dari: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, korupsi. |

| Variabel | Definisi | Pengukuran |
|------------------------------|--|---|
| Sistem Pengendalian Internal | Proses yang dirancang dan harus dipatuhi oleh organisasi guna membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. | Dikembangkan dari PP Nomor 2008 tentang SPIP, yang terdiri dari: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. |
| Asimetri Informasi | Ketidakseimbangan perolehan informasi laporan keuangan antara agent dan principal. | Dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Wilopo (2006), yang terdiri dari: situasi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas, lebih mengenal hubungan input-output, lebih mengetahui potensi kinerja, lebih mengenal teknis pekerjaan, lebih mengenal pengaruh eksternal, dan lebih mengerti apa yang dapat dicapai. |
| Keadilan Distributif | Persepsi karyawan tentang keadilan pendistribusian reward, berupa gaji atau kompensasi. | Dikembangkan oleh Colquitt (2001) dalam Pristiyanti (2012), yang terdiri dari: kompensasi menggambarkan usaha yang dilakukan, menggambarkan apa yang diberikan kepada perusahaan, dan sesuai dengan kinerja. |
| Keadilan Prosedural | Persepsi karyawan tentang keadilan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan reward. | Dikembangkan oleh Colquitt (2001) dalam Pristiyanti (2012), yang terdiri dari: prosedur kompensasi mengekspresikan pandangan dan perasaan, melibatkan karyawan/diaplikasikan secara konsisten, tidak mengandung kepentingan tertentu, didasarkan pada informasi yang akurat, memungkinkan pemberian masukan dan koreksi, dan sesuai dengan etika dan moral. |
| Kultur Organisasi | Suatu nilai atau norma yang tidak tertulis yang berasal yang dianut bersama-sama dan dijadikan dasar aturan berperilaku dalam organisasi. | Dikembangkan oleh Robbin (2006) dalam Faisal (2013), yang terdiri dari: mencurahkan seluruh kemampuan, mengorganisasikan pekerjaan sendiri, ramah, inisiatif (prakarsa), dan rapat (pertemuan) tepat waktu. |
| Penegakan Hukum | Bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. | Dikembangkan oleh Zulkarnain (2013), yang terdiri dari: ketaatan terhadap hukum, proses penegakan hukum, peraturan organisasi, disiplin kerja, dan tanggung jawab. |

| Variabel | Definisi | Pengukuran |
|--------------------|--|--|
| Moralitas Individu | Keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. | Model pengukuran yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dan Rest (1979) dalam Wilopo (2006) melalui kasus etika akuntansi. |

Sumber: Data diolah, 2015

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Dalam pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinan (R^2). Adapun model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$F = \alpha - \beta_1\text{SPI} + \beta_2\text{AI} - \beta_3\text{KD} - \beta_4\text{KP} - \beta_5\text{KO} - \beta_6\text{PH} - \beta_7\text{MI} + e$$

Keterangan:

| | |
|---------------------|--|
| F | = <i>fraud</i> |
| α | = Konstanta |
| $\beta_1.. \beta_7$ | = Koefisien regresi masing-masing variabel independen |
| SPI | = Sistem Pengendalian Internal |
| AI | = Asimetri Informasi |
| KD | = Keadilan Distributif |
| KP | = Keadilan Prosedural |
| KO | = Kultur Organisasi |
| PH | = Penegakan Hukum |
| MI | = Moralitas Individu |
| e | = <i>Error term</i> , yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| <i>Fraud</i> | 95 | 9 | 26 | 13,69 | 4,439 |
| Sistem Pengendalian Internal | 95 | 17 | 25 | 21,86 | 2,186 |
| Asimetri Informasi | 95 | 6 | 30 | 17,37 | 6,745 |
| Keadilan Distributif | 95 | 4 | 20 | 14,59 | 2,611 |
| Keadilan Prosedural | 95 | 13 | 34 | 25,21 | 4,888 |
| Kultur Organisasi | 95 | 8 | 25 | 18,42 | 2,919 |
| Penegakan Hukum | 95 | 13 | 25 | 20,25 | 2,497 |
| Moralitas Individu | 95 | 15 | 30 | 25,41 | 3,496 |

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai *mean* variabel *fraud* sebesar 13,69 yang berarti bahwa *fraud* termasuk dalam kategori sangat jarang terjadi. Nilai *mean* variabel sistem pengendalian internal sebesar 21,86 yang berarti bahwa sistem pengendalian internal termasuk dalam kategori efektif.

Nilai *mean* variabel asimetri informasi sebesar 17, 37 yang berarti bahwa asimetri informasi termasuk dalam kategori cukup. Nilai *mean* variabel keadilan distributif sebesar 14, 59 yang berarti bahwa keadilan distributif termasuk dalam kategori adil. Nilai *mean* variabel keadilan prosedural sebesar 25, 21 yang berarti bahwa keadilan prosedural termasuk dalam kategori adil. Nilai *mean* variabel kultur organisasi sebesar 18, 42 yang berarti bahwa kultur organisasi termasuk dalam kategori baik. Nilai *mean* variabel penegakan hukum sebesar 20, 25 yang berarti bahwa penegakan hukum termasuk dalam kategori tinggi. Nilai *mean* variabel moralitas individu sebesar 25,41 yang berarti bahwa moralitas individu termasuk dalam kategori tinggi.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikut ini tabel yang menyajikan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program SPSS 21:

Tabel 4. Hasil Regresi Berganda

| Variabel | | β | Sig. | α | Hipotesis |
|--|--|---------|-------|----------|-------------------------|
| Sistem Pengendalian Internal→ <i>Fraud</i> | | -0,790 | 0,000 | 5% | H ₁ diterima |
| Asimetri Informasi→ <i>Fraud</i> | | 0,164 | 0,009 | 5% | H ₂ diterima |
| Keadilan Distributif→ <i>Fraud</i> | | 0,103 | 0,562 | 5% | H ₃ ditolak |
| Keadilan Prosedural→ <i>Fraud</i> | | -0,089 | 0,458 | 5% | H ₄ ditolak |
| Kultur Organisasi→ <i>Fraud</i> | | -0,142 | 0,356 | 5% | H ₅ ditolak |
| Penegakan Hukum→ <i>Fraud</i> | | 0,138 | 0,513 | 5% | H ₆ ditolak |
| Moralitas Individu→ <i>Fraud</i> | | -0,274 | 0,036 | 5% | H ₇ diterima |

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4 variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian H₁ diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) yang memperoleh hasil bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thoyibatun (2009), Pristiyanti (2012), Faisal (2013), Zulkarnain (2013), Najahningrum (2013) dan Prawira, dkk (2014) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, yang artinya semakin efektif tingkat pengendalian internal dapat mengurangi tingkat terjadinya *fraud*.

Variabel asimetri berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian H₂ diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) yang memperoleh hasil bahwa dengan adanya asimetri informasi yang tinggi akan memperbesar kecenderungan kecurangan (*fraud*). Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) dan Prawira, dkk. (2014) yang menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Variabel keadilan distributif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian H₃ ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) yang memperoleh hasil tidak terdapat pengaruh keadilan distributif terhadap *fraud*. Menurut Bologna (1993) dalam Pristiyanti (2012) tindakan *fraud* tetap saja dapat terjadi karena adanya faktor keserakahan yang dimiliki oleh setiap individu. Adanya persepsi bahwa manusia tidak pernah merasa puas, memberikan asumsi bahwa adil atau tidak suatu keadilan distributif yang berkaitan dengan

besarnya gaji dan kompensasi yang diterima pegawai di suatu instansi pemerintah, pegawai akan tetap dapat melakukan tindakan *fraud*. Dan dengan adanya keadilan distributif yang tinggi tidak menjadi jaminan untuk dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Variabel keadilan prosedural berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian H₄ ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) yang memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh keadilan prosedural terhadap *fraud*. Menurut Bologna (1993) dalam Pristiyanti (2012) tindakan *fraud* tetap saja dapat terjadi karena adanya faktor keserakahan yang dimiliki oleh setiap individu. Sehingga adil atau tidaknya keadilan prosedural di suatu instansi tidak menjadi jaminan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Variabel kultur organisasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian H₅ ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2013), Zulkarnain (2013) dan Najahningrum (2013) yang menemukan bahwa kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Menurut Faisal (2013) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari rangsangan atau pengaruh faktor lingkungan. Sedangkan faktor internal berasal dari faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi. Pengaruh terbesar dalam diri seorang individu berasal dari dalam diri individu tersebut (internal). Hal tersebut yang dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan, seperti keserakahan, keinginan bergaya hidup mewah, dan pengakuan lebih atas hasil kerja. Hal tersebut merupakan pengaruh terbesar untuk melakukan tindakan *fraud*. Sehingga baik atau tidaknya kultur organisasi tidak menjadi jaminan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Variabel penegakan hukum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian H₆ ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) yang memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud*. Hal tersebut disebabkan karena faktor dari dalam individu seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi dimana hal itu menjadi pengaruh terbesar yang menyebabkan individu melakukan tindak kecurangan. Sehingga baik atau tidaknya penegakan hukum tidak menjadi jaminan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Variabel moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud*. Dengan demikian H₇ diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), Kusumastuti (2012) dan Prawira, dkk (2014) yang menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap *fraud*, yang artinya semakin tinggi moralitas individu akan menurunkan terjadinya *fraud*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap *fraud*, sementara keadilan distributif, keadilan prosedural, kultur organisasi, penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel lain, seperti perilaku tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, M.2013.Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus.Accounting Analysis Journal.2(1).
- Hasmarini, D. P. dan Yuniawan, A. 2008. Pengaruh Keadilan Prosedural dan Distributif terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif. Jurnal Bisnis Strategi Vol. 17 No. 1 Juli 2008.
- Kusumastuti, N. R.2012.Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening.Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP.
- Lubis, A. I. 2010. Akuntansi Keperilakuan, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Najahningrum, A. F. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Analysis Journal.2 (3).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Prawira, dkk. 2014. Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada BUMD Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
- Pristiyanti, I. R.2012.Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan.Accounting Analysis Journal.1 (1).
- Puspasari, N. dan Suwardi, E.2012.Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintah Daerah”. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
- Radarsemarang. 2014. “18 Kasus Korupsi di Jateng Macet”. <http://radarsemarang.com/semarang-metropolis/18-kasus-korupsi-di-jateng-macet/>. Diakses tanggal 4 Januari 2015.
- Suaramerdeka. 2005. “Bupati Temanggung Tersangka Korupsi”. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/08/nas02.htm>. Diakses tanggal 1 November 2014.
- Suaramerdeka. 2014. “Mantan Bupati Temanggung Divonis Tujuh Tahun Penjara”. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/23/210604/Mantan-Bupati-Temanggung-Divonis-Tujuh-Tahun-Penjara>. Diakses tanggal 1 November 2014.
- Sulistyowati, F. 2007. Pengaruh Kepuasan Gajidan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi.JAAI. 11(1): 47–66.
- Supardi.2008. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural, Serta Produktifitas Kerja Pegawai Hotel Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimal.6(1):19-40.
- Thoyibatun, S. 2009. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 16(2) :245-260.
- Tuanakotta, T. 2010. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif Ed. 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilopo.2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Zulkarnain, R. M.2013.Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysys Journal.2 (2).